

Ketika Ekonomi Bertemu Kekuasaan: Tinjauan Kritis

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1



Gagasan Utama

Ekonomi tidak pernah netral. Di balik pasar, investasi, regulasi, dan pertumbuhan, selalu ada relasi kekuasaan yang menentukan siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, dan bagaimana aturan permainan dibentuk.

2

Di Mana Ekonomi Bertemu Kekuasaan?



1. Negara & Regulasi
hukum, perizinan,
pajak, subsidi.



2. Modal & Oligarki
konsentrasi aset,
lobi, akses istimewa.



3. Institusi
rule of law, hak milik,
akuntabilitas.



4. Globalisasi
pasar global, investor,
rantai pasok, kedaulatan.



5. Teknologi & Data
platform digital, algoritma,
kontrol informasi.

3

Mekanisme Kekuasaan dalam Ekonomi



1. Akses
sumber daya



2. Pengaruh
kebijakan



3. Pembentukan
aturan



4. Distribusi
manfaat



5. Reproduksi
kekuasaan



! Ketika akses terhadap modal, informasi, dan pengambil keputusan tidak seimbang, ekonomi mudah berubah menjadi arena dominasi.

4

Risiko Utama



State Capture
kebijakan dibentuk
untuk kepentingan
sempit.



Regulatory Capture
regulator lebih dekat
pada industri
daripada publik.



Ketimpangan
aset dan peluang
terkonsentrasi
pada sedikit pihak.



Eksklusi Sosial
kelompok lemah
tersingkir dari
manfaat pertumbuhan.

5

Dampak terhadap Masyarakat



pertumbuhan
tidak inklusif



daya tawar
pekerja
melemah



UMKM
sulit naik
kelas



ketidakpercayaan
pada negara
meningkat



konflik sumber daya
dan kerusakan
lingkungan



demokrasi
ekonomi
melemah

6

Prinsip Ekonomi yang Sehat



1. Institusi
inklusif



2. Negara kuat
tetapi akuntabel



3. Persaingan
sehat, anti-
monopoli



4. Transparansi
dan pengawasan
publik



5. Distribusi
peluang yang
lebih adil



6. Transformasi
digital yang
etis



Tujuan ekonomi bukan hanya efisiensi, tetapi juga keadilan, legitimasi, dan keberlanjutan.

7

Kesimpulan Kritis



Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya mungkin jika kekuasaan dibatasi, institusi diperkuat, dan kebijakan diarahkan bagi **kesejahteraan bersama, bukan hanya bagi elite.**

”



Ekonomi yang adil memerlukan pasar yang sehat, negara yang akuntabel, dan masyarakat yang berdaya.



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

27 Juni 2026

KETIKA EKONOMI BERTEMU KEKUASAAN: TINJAUAN KRITIS

Abstrak

Ekonomi sering dipahami sebagai ilmu tentang produksi, distribusi, konsumsi, pasar, harga, investasi, dan pertumbuhan. Namun, dalam kenyataan sosial, ekonomi tidak pernah berdiri netral di ruang hampa. Ia selalu bertemu dengan kekuasaan: kekuasaan negara, kekuasaan modal, kekuasaan regulasi, kekuasaan pengetahuan, kekuasaan elite, kekuasaan teknologi, dan kekuasaan global. Artikel ini meninjau secara kritis hubungan antara ekonomi dan kekuasaan dengan menempatkan pasar sebagai konstruksi institusional-politik, bukan sekadar mekanisme alamiah permintaan dan penawaran. Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, institusionalisme, teori negara, teori ketimpangan, dan kajian globalisasi, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi selalu mengandung pilihan politik: siapa memperoleh apa, melalui mekanisme apa, dengan legitimasi apa, dan atas biaya siapa. Literatur institusional kontemporer menunjukkan bahwa kualitas institusi, perlindungan hak, akuntabilitas, dan distribusi kekuasaan sangat menentukan arah kemakmuran suatu bangsa. Namun tinjauan kritis juga mengingatkan bahwa institusi tidak selalu netral; ia dapat menjadi sarana inklusi, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen ekstraksi, dominasi, dan state capture. Oleh sebab itu, pertemuan ekonomi dan kekuasaan harus dibaca bukan hanya sebagai persoalan efisiensi, melainkan sebagai persoalan keadilan, demokrasi, legitimasi, dan keberlanjutan.

Kata kunci: *ekonomi politik, kekuasaan, institusi, kapitalisme, negara, regulasi, ketimpangan, state capture, demokrasi ekonomi, pembangunan inklusif.*

1. Pendahuluan: Ekonomi Tidak Pernah Netral

Judul “Ketika Ekonomi Bertemu Kekuasaan” mengandung satu tesis dasar: ekonomi bukan hanya urusan angka, pasar, inflasi, investasi, ekspor-impor, pertumbuhan, atau neraca fiskal. Ekonomi adalah arena sosial tempat berbagai kepentingan bertemu, bernegosiasi, berkompetisi, dan kadang bertabrakan. Dalam ruang itulah kekuasaan bekerja. Kekuasaan menentukan siapa yang dapat mengakses tanah, modal, kredit, teknologi, lisensi, informasi, kontrak, subsidi, pasar, dan perlindungan hukum. Kekuasaan juga menentukan siapa yang menanggung risiko ketika krisis terjadi: rakyat kecil, pekerja, konsumen, pembayar pajak, pelaku UMKM, atau kelompok elite ekonomi yang justru sering memiliki kemampuan lebih besar untuk mengalihkan risiko kepada negara.

Dalam teori ekonomi arus utama, pasar sering digambarkan sebagai mekanisme koordinasi yang bekerja melalui harga. Harga memberi sinyal kelangkaan, permintaan, dan peluang. Namun dalam kenyataan, harga tidak lahir dari ruang yang sepenuhnya bebas. Harga energi, harga pangan, upah minimum, nilai tukar, bunga kredit, harga tanah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan tarif transportasi selalu terkait dengan kebijakan negara, struktur pasar, kepemilikan aset, monopoli, oligopoli, subsidi, pajak, regulasi, serta kekuatan tawar kelompok sosial. Karena itu, ekonomi tidak cukup dibaca sebagai mekanisme teknis; ia harus dibaca sebagai konfigurasi relasi kuasa.

Ekonomi politik lahir dari kesadaran semacam ini. Ia menolak pemisahan tajam antara “ekonomi” sebagai wilayah rasional-teknis dan “politik” sebagai wilayah kekuasaan. Dalam tradisi ekonomi politik, pasar tidak

hanya dilihat sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan sebagai tatanan institusional yang dibentuk oleh hukum, negara, norma, kepemilikan, kontrak, keamanan, dan legitimasi. Douglass North, misalnya, menekankan bahwa institusi adalah aturan main yang membentuk interaksi manusia dan memengaruhi kinerja ekonomi; karya North juga menunjukkan bahwa perubahan institusional tidak dapat dipisahkan dari insentif, biaya transaksi, dan struktur kekuasaan yang menopang aturan tersebut. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Dalam konteks kontemporer, pentingnya institusi memperoleh pengakuan besar. Hadiah Nobel Ekonomi 2024 diberikan kepada Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson karena studi mereka tentang bagaimana institusi terbentuk dan memengaruhi kemakmuran. Komite Nobel menekankan bahwa masyarakat dengan rule of law yang lemah dan institusi yang mengeksploitasi penduduk tidak menghasilkan pertumbuhan dan perubahan yang baik. ([NobelPrize.org](#)) Pernyataan ini memperkuat gagasan bahwa kemakmuran bukan hanya hasil akumulasi modal dan teknologi, melainkan juga hasil struktur politik yang menentukan apakah institusi bekerja secara inklusif atau ekstraktif.

2. Ekonomi sebagai Sistem yang Tertanam dalam Masyarakat

Salah satu kesalahan besar dalam memahami ekonomi modern adalah menganggap pasar sebagai entitas otonom yang berdiri di atas masyarakat. Padahal pasar selalu tertanam dalam struktur sosial. Karl Polanyi dalam *The Great Transformation* menunjukkan bahwa “masyarakat pasar” modern bukan hasil spontan alamiah, melainkan hasil transformasi politik dan institusional yang menjadikan tanah, tenaga kerja, dan uang seolah-olah sebagai komoditas. Kajian Fred Block tentang Polanyi menegaskan bahwa karya Polanyi penting karena memperlihatkan bagaimana pembangunan pasar modern selalu terkait dengan tindakan negara dan rekayasa sosial, bukan sekadar proses alamiah pertukaran. ([Springer](#))

Dari perspektif ini, pasar tidak pernah bebas dalam arti murni. Ia selalu memerlukan negara. Negara menyediakan hukum kontrak, perlindungan hak milik, mata uang, infrastruktur, pengadilan, keamanan, standar akuntansi, lembaga pengawas, bank sentral, dan sistem penyelesaian sengketa. Tanpa semua itu, pasar bukan menjadi arena efisiensi, melainkan arena ketidakpastian, kekerasan, dan dominasi yang kasar. Dengan kata lain, pasar membutuhkan kekuasaan agar dapat bekerja. Tetapi di sinilah paradoksnya: kekuasaan yang dibutuhkan pasar juga dapat disalahgunakan untuk menguasai pasar.

Dalam masyarakat modern, kekuasaan ekonomi dapat berubah menjadi kekuasaan politik melalui pembiayaan politik, lobi regulasi, kepemilikan media, kontrol atas data, pengaruh terhadap opini publik, akses terhadap pengambil keputusan, dan kemampuan memindahkan modal. Sebaliknya, kekuasaan politik dapat berubah menjadi kekuasaan ekonomi melalui pemberian lisensi, konsesi, kontrak pemerintah, izin tambang, proyek infrastruktur, proteksi tarif, pengaturan kredit, dan kebijakan fiskal. Pertemuan ekonomi dan kekuasaan dengan demikian bukan kejadian sesaat, melainkan struktur permanen dalam kapitalisme modern.

3. Institusi: Antara Inklusi dan Ekstraksi

Dalam literatur institusional, institusi yang baik biasanya dikaitkan dengan kepastian hukum, perlindungan hak milik, akuntabilitas, kapasitas negara, dan mekanisme pembatasan kekuasaan. North dan Weingast, dalam studi klasik tentang Inggris abad ke-17, menunjukkan bahwa perubahan konstitusional setelah Glorious Revolution berkaitan dengan kemampuan negara membuat komitmen kredibel terhadap hak milik dan pembatasan tindakan konfiskatoris. ([Cambridge University Press & Assessment](#)) Dalam bahasa sederhana, ekonomi memerlukan negara yang cukup kuat untuk menjaga aturan, tetapi cukup terbatas agar tidak sewenang-wenang.

Acemoglu, Johnson, dan Robinson mengembangkan argumen bahwa perbedaan kemakmuran antarnegara banyak ditentukan oleh jenis institusi yang berkembang secara historis. Dalam artikel mereka tentang asal-usul kolonial pembangunan komparatif, mereka membedakan institusi yang lebih inklusif dari institusi yang lebih ekstraktif. Institusi inklusif memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan partisipasi politik, sedangkan institusi ekstraktif memusatkan manfaat ekonomi kepada kelompok kecil yang berkuasa. ([American Economic Association](#))

Namun tinjauan kritis perlu menambahkan bahwa institusi tidak selalu otomatis menjadi baik hanya karena disebut "formal", "modern", atau "pro-pasar". Institusi dapat dirancang untuk melayani kepentingan umum, tetapi juga dapat dikonstruksi untuk mengunci keistimewaan elite. Aturan perizinan dapat melindungi lingkungan dan keselamatan publik, tetapi dapat pula menjadi alat rente. Subsidi dapat membantu kelompok miskin, tetapi dapat pula bocor kepada kelompok mampu. Privatisasi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi dapat pula mengalihkan aset publik kepada oligarki. Regulasi dapat menjaga persaingan, tetapi dapat pula menjadi instrumen regulatory capture.

Stigler dalam teori regulasi ekonomi menunjukkan bahwa regulasi sering kali tidak netral karena kelompok industri yang diatur memiliki insentif kuat untuk memengaruhi regulator. ([repository.law.upenn.edu](#)) Dalam praktiknya, kelompok yang memiliki sumber daya, informasi, jaringan, dan akses politik dapat membentuk aturan sedemikian rupa sehingga aturan tampak legal, tetapi substansinya menguntungkan kelompok tertentu. Inilah titik krusial pertemuan ekonomi dan kekuasaan: dominasi tidak selalu berlangsung melalui pelanggaran hukum; ia sering berlangsung melalui produksi hukum itu sendiri.

4. Negara: Wasit, Pemain, atau Arena Perebutan?

Negara sering dibayangkan sebagai wasit yang netral. Dalam teori ideal, negara menetapkan aturan, menjaga persaingan, mengoreksi kegagalan pasar, menyediakan barang publik, melindungi kelompok rentan, dan memastikan stabilitas makroekonomi. Namun dalam kenyataan, negara bukan sekadar wasit; ia juga pemain ekonomi dan arena perebutan kepentingan. Negara menguasai anggaran, pajak, regulasi, perizinan, BUMN, proyek publik, diplomasi ekonomi, dan instrumen pemaksaan hukum. Karena itu, negara memiliki kapasitas besar untuk menciptakan kemakmuran, tetapi juga memiliki kapasitas besar untuk menciptakan distorsi.

Peter Evans membedakan negara predatori dan negara developmental. Negara predatori menggunakan kekuasaan publik untuk ekstraksi sempit, sedangkan negara developmental memiliki kapasitas birokratik, disiplin institusional, dan hubungan produktif dengan sektor swasta untuk mendorong transformasi industri. ([Springer](#)) Dalam konteks pembangunan, pertanyaannya bukan apakah negara harus hadir atau tidak, melainkan negara seperti apa yang hadir: negara yang melayani publik, negara yang ditangkap elite, atau negara yang mampu mengarahkan pembangunan secara strategis tetapi tetap akuntabel.

Negara yang terlalu lemah mudah dikuasai oleh oligarki, mafia, kartel, dan kelompok rente. Negara yang terlalu kuat tetapi tidak akuntabel dapat berubah menjadi mesin kontrol, represi, dan patronase. Karena itu, pembangunan memerlukan keseimbangan: kapasitas negara yang kuat, tetapi dibatasi oleh hukum; kepemimpinan strategis, tetapi dikontrol oleh transparansi; kolaborasi negara-bisnis, tetapi tidak jatuh ke kolusi; kebijakan industri, tetapi tidak menjadi proteksi permanen bagi perusahaan tidak efisien.

Dalam perspektif ini, good governance tidak cukup dipahami sebagai efisiensi administrasi. Ia harus dipahami sebagai tata kelola kekuasaan. Pertanyaan good governance bukan hanya "apakah prosedur berjalan?",

tetapi "siapa yang diuntungkan oleh prosedur itu?", "siapa yang tidak punya suara?", "siapa yang menanggung biaya?", dan "apakah mekanisme koreksi tersedia ketika kekuasaan menyimpang?"

5. State Capture: Ketika Negara Ditangkap Kepentingan Sempit

Salah satu bentuk paling serius dari pertemuan ekonomi dan kekuasaan adalah *state capture*. State capture terjadi ketika aktor ekonomi kuat memengaruhi pembentukan hukum, regulasi, dan kebijakan publik untuk keuntungan privat. Hellman, Jones, dan Kaufmann menunjukkan bahwa dalam ekonomi transisi, perusahaan yang mampu "menangkap negara" dapat memperoleh keuntungan besar, sementara sektor usaha secara keseluruhan dan kepentingan publik justru dirugikan. ([Open Knowledge Repository](#))

State capture berbeda dari korupsi administratif biasa. Korupsi administratif terjadi ketika aturan dilanggar untuk mendapatkan keuntungan. State capture lebih dalam: aturan dibentuk agar keuntungan kelompok tertentu menjadi legal. Dalam korupsi biasa, seseorang membayar untuk menghindari aturan. Dalam state capture, seseorang membayar, melobi, atau menekan agar aturan dibuat sesuai kepentingannya. Karena itu, state capture lebih sulit dilihat dan lebih sulit dibuktikan. Ia dapat tampak sebagai kebijakan resmi, keputusan legal, atau reformasi ekonomi, padahal substansinya mempersempit kompetisi dan memperbesar rente.

Contoh naratifnya dapat dilihat pada sektor sumber daya alam. Bila izin pertambangan, perkebunan, atau konsesi hutan diberikan melalui proses tidak transparan, maka kekayaan alam berubah menjadi sumber rente. Rakyat lokal menanggung kerusakan lingkungan, negara kehilangan penerimaan optimal, sementara kelompok tertentu menikmati akumulasi modal. Dalam situasi seperti ini, ekonomi tidak hanya bertemu kekuasaan; ekonomi menjadi bentuk kekuasaan yang mengatur ruang hidup masyarakat.

State capture juga dapat terjadi dalam sektor keuangan, infrastruktur, digital, pendidikan, kesehatan, dan pangan. Ketika regulasi dibuat terlalu rumit, pelaku kecil tersingkir. Ketika akses pembiayaan hanya tersedia bagi kelompok besar, UMKM sulit naik kelas. Ketika data digital dikuasai beberapa platform, konsumen dan pelaku usaha kecil kehilangan posisi tawar. Ketika kebijakan pangan lebih menguntungkan importir atau kartel distribusi daripada petani dan konsumen, ekonomi pangan menjadi arena dominasi.

6. Kekuasaan Modal dan Ketimpangan

Kekuasaan ekonomi tidak hanya bekerja melalui negara, tetapi juga melalui struktur kepemilikan. Mereka yang memiliki aset produktif—tanah, modal finansial, saham, teknologi, data, paten, infrastruktur, jaringan distribusi—memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan arah ekonomi. Ketimpangan aset jauh lebih menentukan daripada ketimpangan pendapatan karena aset menghasilkan pendapatan masa depan dan diwariskan lintas generasi.

Piketty dan Zucman menunjukkan bahwa rasio kekayaan terhadap pendapatan di negara-negara kaya meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir; mereka mencatat kenaikan dari sekitar 200–300% pada 1970 menjadi sekitar 400–600% pada 2010. ([OUP Academic](#)) Temuan ini penting karena ketika kekayaan tumbuh lebih cepat daripada pendapatan kerja, maka pemilik aset memperoleh posisi yang semakin kuat. Dalam masyarakat seperti itu, meritokrasi dapat melemah karena peluang hidup lebih banyak ditentukan oleh warisan, kepemilikan, dan akses modal daripada kerja keras semata.

Ketimpangan ekonomi kemudian dapat berubah menjadi ketimpangan politik. Gilens dan Page dalam studi tentang politik Amerika Serikat menemukan bahwa elite ekonomi dan kelompok kepentingan bisnis memiliki pengaruh independen yang besar terhadap kebijakan, sementara

warga biasa dan kelompok massa memiliki pengaruh independen yang jauh lebih kecil. ([Cambridge University Press & Assessment](#)) Walaupun konteksnya Amerika Serikat, temuan ini memberi pelajaran umum: demokrasi elektoral tidak otomatis menjamin demokrasi substantif bila akses terhadap pembuat kebijakan sangat timpang.

Dalam masyarakat dengan ketimpangan tinggi, suara politik secara formal mungkin sama, tetapi kemampuan memengaruhi kebijakan tidak sama. Orang miskin memiliki satu suara; orang kaya juga satu suara. Namun orang kaya dapat membiayai kampanye, menyewa konsultan, membangun media, mendanai riset, membentuk opini, membayar lobi, dan mengakses jaringan kekuasaan. Di sinilah demokrasi menghadapi tantangan serius: bagaimana memastikan kesetaraan politik di tengah ketimpangan ekonomi yang besar?

7. Demokrasi Ekonomi: Melampaui Demokrasi Elektoral

Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu. Pemilu penting, tetapi demokrasi yang sehat juga memerlukan demokrasi ekonomi: akses yang adil terhadap peluang, perlindungan pekerja, mobilitas sosial, persaingan sehat, jaminan sosial, pendidikan bermutu, kesehatan terjangkau, dan kebijakan publik yang tidak dikendalikan oleh kepentingan sempit.

Acemoglu, Naidu, Restrepo, dan Robinson memberikan bukti empiris bahwa demokratisasi dapat meningkatkan GDP per kapita dalam jangka panjang; mereka menyebut mekanisme seperti peningkatan investasi, pendidikan, reformasi ekonomi, barang publik, dan penurunan keresahan sosial. ([Chicago Journals](#)) Namun demokrasi yang menghasilkan pertumbuhan bukan demokrasi prosedural yang dangkal, melainkan demokrasi yang mampu membangun institusi akuntabel, membatasi oligarki, memperluas partisipasi, dan menciptakan kebijakan publik yang dipercaya.

Demokrasi ekonomi tidak berarti anti-pasar. Sebaliknya, demokrasi ekonomi justru berupaya menyelamatkan pasar dari dominasi sempit. Pasar yang sehat memerlukan kompetisi. Kompetisi memerlukan aturan. Aturan memerlukan negara. Negara memerlukan akuntabilitas. Akuntabilitas memerlukan partisipasi publik. Maka demokrasi ekonomi adalah upaya membangun lingkaran kebajikan antara pasar, negara, dan masyarakat.

Tanpa demokrasi ekonomi, pertumbuhan dapat menjadi eksklusif. Angka makro tampak baik, tetapi sebagian besar rakyat tidak merasakan mobilitas. PDB naik, tetapi upah stagnan. Investasi masuk, tetapi pekerjaan berkualitas rendah. Infrastruktur dibangun, tetapi tanah rakyat tergusur. Ekspor meningkat, tetapi nilai tambah rendah. Digitalisasi berkembang, tetapi pekerja platform tidak terlindungi. Dalam keadaan seperti ini, ekonomi tumbuh, tetapi legitimasi sosial melemah.

8. Globalisasi, Kedaulatan, dan Kekuasaan Transnasional

Dalam era globalisasi, pertemuan ekonomi dan kekuasaan tidak lagi hanya terjadi di dalam negara. Ia juga terjadi di tingkat global. Perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional, pasar modal, rantai pasok global, lembaga pemeringkat kredit, platform digital, dan rezim perdagangan internasional ikut membentuk ruang kebijakan nasional.

Rodrik menjelaskan trilema ekonomi-politik global: integrasi ekonomi internasional yang mendalam, negara-bangsa, dan politik demokratis tidak dapat secara penuh berjalan bersamaan; suatu masyarakat harus memilih kombinasi tertentu dari ketiganya. ([American Economic Association](#)) Artinya, semakin dalam suatu negara masuk dalam hiperglobalisasi, semakin terbatas ruang kebijakan domestiknya, kecuali negara tersebut mengorbankan sebagian kedaulatan atau mengurangi ruang demokrasi substantif.

Persoalan ini sangat relevan bagi negara berkembang. Di satu sisi, integrasi global diperlukan untuk investasi, teknologi, pasar ekspor, dan

pembelajaran industri. Di sisi lain, integrasi yang tidak selektif dapat melemahkan industri lokal, menciptakan ketergantungan impor, menekan buruh, dan membuat kebijakan nasional terlalu tunduk pada pasar global. Karena itu, strategi pembangunan tidak cukup hanya "terbuka" atau "tertutup". Yang dibutuhkan adalah keterbukaan strategis: terbuka untuk pembelajaran, investasi produktif, dan ekspor bernilai tambah, tetapi cukup berdaulat untuk melindungi kepentingan nasional, industri pemula, pangan, energi, data, dan kesejahteraan rakyat.

Rodrik, Subramanian, dan Trebbi juga menunjukkan bahwa institusi memiliki pengaruh sangat kuat dalam menjelaskan perbedaan pendapatan antarnegara, bahkan dibandingkan faktor geografi dan integrasi. ([Springer](#)) Temuan ini penting karena globalisasi tidak otomatis menghasilkan kemakmuran. Negara yang institusinya kuat dapat menggunakan globalisasi sebagai alat naik kelas; negara yang institusinya lemah dapat justru menjadi arena ekstraksi nilai oleh aktor domestik dan global.

9. Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan Kekuasaan?

Negara kaya sumber daya alam sering menghadapi paradoks. Kekayaan alam seharusnya menjadi modal pembangunan, tetapi dalam banyak kasus justru melahirkan konflik, korupsi, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Literatur menyebutnya *resource curse*. Ross menunjukkan bahwa kutukan sumber daya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik: sumber daya alam dapat memperkuat rente, melemahkan akuntabilitas, dan mengurangi insentif negara untuk membangun basis pajak yang sehat. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Secara politik, pajak memiliki fungsi demokratis. Bila negara bergantung pada pajak rakyat, negara harus mendengar rakyat. Namun bila negara bergantung pada rente sumber daya alam, terutama dari sektor ekstraktif, hubungan fiskal antara negara dan warga dapat melemah. Pemerintah memperoleh penerimaan tanpa perlu memperluas akuntabilitas kepada

warga. Dalam situasi seperti itu, kekuasaan ekonomi dari sumber daya alam dapat memperkuat kekuasaan politik yang tertutup.

Tetapi sumber daya alam tidak otomatis menjadi kutukan. Ia menjadi kutukan bila institusi lemah, transparansi rendah, masyarakat lokal tidak dilibatkan, kontrak tidak adil, nilai tambah tidak dibangun, dan lingkungan tidak dilindungi. Sebaliknya, sumber daya alam dapat menjadi berkah bila dikelola melalui tata kelola yang transparan, hilirisasi yang cerdas, pembagian manfaat yang adil, perlindungan ekologis, dan investasi jangka panjang pada pendidikan, riset, teknologi, serta diversifikasi ekonomi.

10. Teknologi Digital, Data, dan Kekuasaan Baru

Pada abad ke-21, kekuasaan ekonomi semakin ditentukan oleh data, algoritma, platform, dan kecerdasan buatan. Data bukan sekadar informasi; data adalah aset strategis. Platform digital dapat menghubungkan jutaan pengguna, tetapi juga dapat menguasai perilaku konsumen, menentukan visibilitas usaha kecil, mengatur tarif, membentuk preferensi, dan mengumpulkan rente dari transaksi.

Kekuasaan digital memiliki karakter baru. Pertama, ia bersifat tidak kasatmata. Pengguna merasa bebas memilih, tetapi pilihan sering diarahkan oleh algoritma. Kedua, ia bersifat terkonsentrasi. Semakin banyak pengguna, semakin kuat efek jaringan, sehingga pemenang pasar menjadi semakin dominan. Ketiga, ia bersifat lintas batas. Perusahaan digital dapat beroperasi di banyak negara, sementara regulasi tetap berbasis yurisdiksi nasional. Keempat, ia menghasilkan asimetri informasi ekstrem: platform mengetahui banyak tentang pengguna, tetapi pengguna tidak mengetahui bagaimana platform mengambil keputusan.

Pertemuan ekonomi dan kekuasaan dalam dunia digital karena itu memerlukan tata kelola baru. Regulasi persaingan, perlindungan data pribadi, audit algoritma, pajak digital, perlindungan pekerja platform, dan kedaulatan data menjadi isu sentral. Tanpa itu, ekonomi digital dapat

memperbesar ketimpangan dan menciptakan bentuk baru ketergantungan. Teknologi yang seharusnya membebaskan dapat berubah menjadi instrumen dominasi bila tidak dikawal oleh etika, hukum, dan demokrasi.

11. Kekuasaan Pengetahuan: Ekonomi sebagai Bahasa Kebijakan

Kekuasaan juga bekerja melalui pengetahuan. Dalam dunia kebijakan publik, istilah seperti efisiensi, stabilitas, reformasi struktural, liberalisasi, fleksibilitas tenaga kerja, kemudahan berusaha, disiplin fiskal, subsidi tepat sasaran, dan daya saing sering dianggap netral. Padahal setiap istilah membawa asumsi nilai. Misalnya, "fleksibilitas tenaga kerja" dapat berarti efisiensi bagi perusahaan, tetapi ketidakpastian bagi pekerja. "Efisiensi anggaran" dapat berarti penghematan negara, tetapi pengurangan layanan bagi masyarakat rentan. "Kemudahan investasi" dapat berarti percepatan bisnis, tetapi juga dapat berarti pelonggaran perlindungan lingkungan bila tidak diawasi.

Di sinilah ekonomi sebagai ilmu dapat menjadi alat pencerahan sekaligus alat legitimasi. Ekonomi membantu memahami trade-off, insentif, kelangkaan, produktivitas, dan alokasi sumber daya. Namun ekonomi juga dapat digunakan untuk membenarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Tinjauan kritis tidak menolak ilmu ekonomi, tetapi menolak penggunaan ekonomi sebagai bahasa teknokratis yang menutupi konflik distribusi.

Setiap kebijakan ekonomi harus ditanya: efisien untuk siapa? Produktif bagi siapa? Stabil bagi siapa? Menguntungkan siapa? Mengorbankan siapa? Pertumbuhan untuk siapa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar ekonomi tidak berubah menjadi teknokrasi tanpa moral.

12. Menuju Ekonomi yang Berkeadilan dan Berdaya Tahan

Pertemuan ekonomi dan kekuasaan tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengaturnya agar kekuasaan tidak menjadi dominasi, dan ekonomi tidak menjadi alat ekstraksi. Untuk itu, ada beberapa prinsip normatif yang dapat diajukan.

Pertama, ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan etika publik. Pasar memerlukan kebebasan, tetapi kebebasan pasar harus berada dalam batas keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan martabat manusia. Kedua, negara harus memiliki kapasitas, tetapi kapasitas negara harus diimbangi dengan akuntabilitas. Negara lemah berbahaya karena mudah ditangkap; negara kuat tanpa akuntabilitas juga berbahaya karena dapat menindas.

Ketiga, kebijakan ekonomi harus memperluas akses, bukan hanya memperbesar agregat. Pertumbuhan penting, tetapi pertumbuhan yang tidak memperluas kesempatan akan menciptakan frustrasi sosial. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, akses kredit, transformasi UMKM, dan perlindungan pekerja adalah bagian dari ekonomi produktif, bukan sekadar belanja sosial.

Keempat, regulasi harus mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi. Persaingan sehat, anti-monopoli, transparansi kepemilikan, pembatasan konflik kepentingan, dan pengawasan lobi adalah syarat demokrasi ekonomi. Kelima, tata kelola sumber daya alam dan data harus dipandang sebagai isu kedaulatan publik. Kekayaan alam dan data masyarakat tidak boleh menjadi rente sempit; keduanya harus dikelola untuk kesejahteraan lintas generasi.

13. Kesimpulan

Ketika ekonomi bertemu kekuasaan, yang muncul bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan moral dan politik. Ekonomi menentukan distribusi kehidupan: siapa bekerja, siapa memiliki, siapa menikmati, siapa tersingkir, siapa dilindungi, dan siapa dikorbankan. Kekuasaan menentukan aturan

permainan: siapa boleh masuk pasar, siapa memperoleh izin, siapa mendapat subsidi, siapa membayar pajak, siapa diawasi, dan siapa dibiarkan.

Tinjauan kritis terhadap pertemuan ekonomi dan kekuasaan mengajarkan bahwa pasar tidak boleh dipuja sebagai mekanisme otomatis yang selalu adil, tetapi negara juga tidak boleh dipuja sebagai penyelamat yang selalu bijak. Keduanya harus dikawal oleh institusi yang akuntabel, masyarakat sipil yang kuat, ilmu pengetahuan yang jujur, media yang independen, hukum yang adil, dan etika publik yang hidup.

Masa depan ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang bebas dari kekuasaan, karena itu mustahil. Masa depan yang sehat adalah ekonomi di mana kekuasaan dibatasi, diawasi, didemokratisasi, dan diarahkan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, ekonomi tidak berhenti sebagai mesin pertumbuhan, tetapi menjadi sarana peradaban: membangun kesejahteraan, memperluas martabat, menjaga bumi, dan memperkuat kehidupan bersama.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban pemegang kekuasaan untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas keputusan yang diambil.

Demokrasi ekonomi

Gagasan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dalam pemilu, tetapi juga harus hadir dalam akses terhadap peluang ekonomi, distribusi aset, perlindungan pekerja, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan ekonomi.

Developmental state

Negara yang memiliki kapasitas birokratik, visi strategis, dan hubungan produktif dengan sektor swasta untuk mendorong transformasi industri dan pembangunan jangka panjang.

Ekonomi politik

Kajian tentang hubungan antara proses ekonomi dan kekuasaan politik, termasuk bagaimana kebijakan, institusi, dan distribusi sumber daya dibentuk oleh kepentingan sosial.

Institusi

Aturan formal dan informal yang mengatur perilaku sosial, ekonomi, dan politik, seperti hukum, norma, kontrak, birokrasi, dan sistem pengadilan.

Institusi ekstraktif

Institusi yang memusatkan manfaat ekonomi dan politik kepada kelompok kecil dengan mengorbankan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat luas.

Institusi inklusif

Institusi yang memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, perlindungan hukum, partisipasi politik, dan mobilitas sosial.

Kekuasaan modal

Kemampuan pemilik aset, kapital finansial, teknologi, dan jaringan ekonomi untuk memengaruhi pasar, kebijakan, dan kehidupan sosial.

Ketimpangan aset

Perbedaan kepemilikan kekayaan produktif seperti tanah, rumah, saham, perusahaan, data, dan instrumen finansial.

Oligarki

Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok kecil yang mampu memengaruhi keputusan publik untuk mempertahankan kepentingannya.

Regulatory capture

Situasi ketika lembaga pengatur yang seharusnya melayani kepentingan

publik justru dipengaruhi atau dikuasai oleh industri atau kelompok yang diaturnya.

Resource curse

Paradoks ketika negara kaya sumber daya alam justru mengalami korupsi, konflik, ketimpangan, lemahnya diversifikasi ekonomi, atau stagnasi pembangunan.

Rule of law

Prinsip bahwa hukum berlaku secara adil, konsisten, dan tidak sewenang-wenang terhadap semua pihak, termasuk penguasa.

State capture

Keadaan ketika aktor privat yang kuat memengaruhi pembentukan hukum, regulasi, dan kebijakan negara untuk keuntungan sempit mereka.

Trilema globalisasi

Gagasan bahwa demokrasi, kedaulatan nasional, dan integrasi ekonomi global yang mendalam tidak dapat dicapai secara penuh sekaligus.

Daftar Pustaka

Format APA 7 dengan DOI

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. doi:10.1257/aer.91.5.1369

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47–100. doi:10.1086/700936

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2000). Political losers as a barrier to economic development. *American Economic Review*, 90(2), 126–130. doi:10.1257/aer.90.2.126

- Block, F. (2003). Karl Polanyi and the writing of *The Great Transformation*. *Theory and Society*, 32, 275–306. doi:10.1023/A:1024420102334
- Djankov, S., Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2003). The new comparative economics. *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 595–619. doi:10.1016/j.jce.2003.08.005
- Evans, P. B. (1989). Predatory, developmental, and other apparatuses: A comparative political economy perspective on the Third World state. *Sociological Forum*, 4(4), 561–587. doi:10.1007/BF01115064
- Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581. doi:10.1017/S1537592714001595
- Hacker, J. S., & Pierson, P. (2010). Winner-take-all politics: Public policy, political organization, and the precipitous rise of top incomes in the United States. *Politics & Society*, 38(2), 152–204. doi:10.1177/0032329210365042
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). "Seize the state, seize the day": State capture, corruption, and influence in transition. *World Bank Policy Research Working Paper No. 2444*. doi:10.1596/1813-9450-2444
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 751–773. doi:10.1016/j.jce.2003.09.006
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511808678
- North, D. C., & Weingast, B. R. (1989). Constitutions and commitment: The evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *The Journal of Economic History*, 49(4), 803–832. doi:10.1017/S0022050700009451
- Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. *American Political Science Review*, 87(3), 567–576. doi:10.2307/2938736

Piketty, T., & Zucman, G. (2014). Capital is back: Wealth-income ratios in rich countries 1700–2010. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(3), 1255–1310. doi:10.1093/qje/qju018

Rodrik, D. (2000). How far will international economic integration go? *Journal of Economic Perspectives*, 14(1), 177–186. doi:10.1257/jep.14.1.177

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. doi:10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85

Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. *World Politics*, 51(2), 297–322. doi:10.1017/S0043887100008200

Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. doi:10.2307/3003160

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 27 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a3fb765-ecdc-83ec-9118-52040ffe3a2e>